

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kajian atau penelitian tentang kebijakan publik tak bisa dilepaskan dari teori-teori yang mendasarinya. Teori-teori ini dipergunakan untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat dan pemerintahan. Sebab suatu teori dianggap relevan dengan fenomena yang terjadi dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Secara teoritik, ada sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidang kajian ini. Kata “Kebijakan” merupakan terjemahan dari *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum (Abidin, 2012:7).

Sedangkan secara etimologi, *policy* berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi “*politia*” yang berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi “*policie*” yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:7).

Pengertian Publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki konotasi, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan

publik adalah kebijakan pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “*what goverment do or not to do*”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2012:7).

Dalam sifat kebijakan dibedakan orang dengan pintar (*clever*) dan cerdas (*smart*). Pintar dapat berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sedangkan cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat menemukan jawaban terhadap suatu persoalan yang dihadapi dengan cepat (Abidin, 2012:4).

Menurut R. Dye dalam Miftah Thoha (2011:107) mengemukakan *Public policy* atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever goverment choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik, dimana sering implementasi kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik, kadang dalam implementasinya menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik sebelum di implementasikan, harus melalui perencanaan sehingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan teori/

konsep dan kondisi obyektif masyarakat. Tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak berarti atau tidak mempunyai nilai jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tercapainya tujuan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho,2012:674).

Sesuai dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Djadja Saefullah (Arifin, 2011:83) menyatakan bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami dari dua perspektif yakni; Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.

Kedua, perspektif administrasi, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum

mengapa suatu kebijakan publik tersebut meskipun telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Menurut Anderson (Arifin, 2011:89) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi;
2. Hakikat proses administrasi;
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan;
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarahkan pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Daniel Mazman dan Paul Sabatier (Widodo, 2010:87) menjelaskan makna implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman demikian meliputi usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik yang diharapkan mencapai tujuan yang telah digariskan.

2.1.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005, hal.88).

2.1.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III

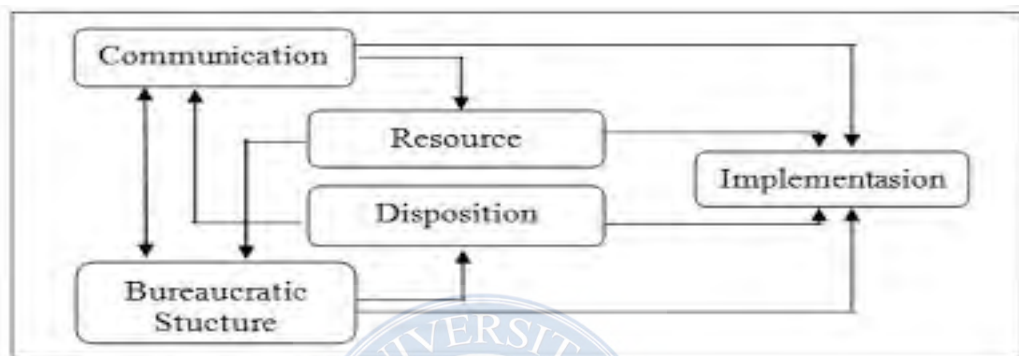
George C. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III



Sumber: Widodo, 2011:107

Sesuai dengan gambar 2.1 diatas, implementasi model George C. Edwards III terdiri dari :

a. Komunikasi (*Communication*);

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang

berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*);

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai

sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*);

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*);

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*);

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*);

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*);

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*);

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah *mekanisme*, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah *struktur birokrasi*, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.1.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Wibawa *et al*, 1994:19), “merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi

kinerja suatu kebijakan.” Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99) mengemukakan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- 4) Karakteristik agen pelaksana;
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik;
- 6) Sikap para pelaksana.

Pandangan Van Meter dan Van Horn diatas sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pendapat George C. Edwards III, dimana Van Meter dan Van Horn lebih menekankan pada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.3.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Grindle (Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi.

2.1.3.4 Model Implementasi Kebijakan Publik Charles O. Jones

Jones (1996 : 166) mengatakan bahwa : “Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan;
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan publik diatas, maka model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut George C. Edwards III.

2.2. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

2.2.1 Pengertian SIKD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 pasal 1 ayat 15 “*Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah*”.

Salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat. Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan informasi keuangan kepada masyarakat, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/ informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah setiap tahun anggaran kepada Pemerintah Pusat. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi data/ informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para stakeholder atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

2.2.2 Tujuan SIKD

Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 101 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 pasal 9 pemerintah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional dengan tujuan :

- a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

- b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
- c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran dan,
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, fungsi pembantuan, pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah.

Penyelenggaran SIKD dilaksanakan secara nasional baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat disebut dengan SIPKD Nasional.

2.2.3. Dasar Hukum SIKD

Adapun dasar hukum dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

2.2.4. Ruang Lingkup SIKD

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan. SIKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada.

2.3. Teknologi Aplikasi

2.3.1. Aplikasi Berbasis Web dan Desktop

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang berjalan diatas platform browser, meskipun mungkin dioptimalkan pada jenis browser tertentu. Aplikasi berbasis web sangat mudah untuk digunakan hanya perlu alamat website yang dibutuhkan kemudian aplikasi web menjalankan semua perintah yang dikehendaki, tidak perlu install, update dan apapun untuk bekerja pada aplikasi berbasis web tersebut.

Sedangkan aplikasi berbasis desktop selalu membutuhkan setup dan install pada komputer sebelum aplikasi dapat dijalankan. Aplikasi berbasis desktop disesuaikan dengan aplikasi yang dibangun membutuhkan platform yang sama dengan aplikasi desktop tersebut dibangun, dalam arti adanya ketergantungan secara umum pada sistem operasi.

Tabel 2.1
Kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi berbasis

| No | Jenis Aplikasi | Kelebihan | Kekurangan |
|----|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Berbasis Web | a. Dapat diakses kapan pun dan dari mana pun selama ada jaringan internet. b. Dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser (umumnya sudah tersedia di PC, PDA dan handphone) tidak perlu menginstall aplikasi client khusus. | a. Terbatasnya kecepatan internet membuat proses aplikasi menjadi lambat. |
| 2 | Berbasis Desktop | a. Kecepatan dan kinerja aplikasi jauh lebih cepat dibandingkan web yang sangat tergantung dengan koneksi internet. b. Berkolaborasi data dan frame-frame kerja tanpa tergantung pada keharusan online. | a. Setiap pengguna aplikasi harus di install terlebih dahulu. b. Platform harus sama. c. Distribusi aplikasi lama jika dalam jumlah pengguna banyak. |

Menurut Tabel 2.1 diatas, apabila kita dihadapkan pada pertanyaan untuk memilih teknologi berbasis dekstop atau berbasis web, pada dasarnya kedua

aplikasi ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Aplikasi berbasis dekstop membatasi pengguna, aplikasi berbasis web dapat diakses oleh siapa saja, kecuali memiliki jalur sendiri. Melihat trend sekarang dan kedepan aplikasi berbasis web lebih memiliki keuntungan karena dapat mengurangi biaya-biaya pengadaan software yang dibutuhkan yang cenderung open source dan multi platform.

2.4. Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Web

2.4.1. Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi

Menurut Gelinas, Oram dan Wiggins (1990), sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Bodnar dan Hopwood (1993), sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna.

Sedangkan Hall (2001), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Abdul Kadir (2014) yang dimaksud dengan informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer biasa disebut sistem informasi berbasis komputer.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan

prosedur kerja), sesuatu yang diproses (data menjadi informasi) dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Abdul Kadir,2014).

Menurut kamus Oxford (1995) teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama komputer untuk menyimpan menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Menurut Alter (1992) teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data. Martin (1999), mendefenisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.

Secara lebih umum, Lucas (2000) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (spreadsheet) dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi.

2.4.2. Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Web

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Pasal 9, fungsi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah menyajikan Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat, menyiapkan rumusan kebijakan

teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD, membakukan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Bentuk penyelenggaraan SIKD diatur lebih lanjut pada pasal 13 meliputi: (1). penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). (2). penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah. (3) penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, Pemerintah Daerah secara Nasional diwajibkan untuk menyusun Sistem Informasi Keuangan yang berbasis *E-Accounting atau Web*, sebagai upaya pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan secara akurat, cepat dan terbuka, dimana informasi tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui media internet. Penyajian informasi keuangan dengan manual tidak efektif lagi diterapkan, karena dapat menghambat keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan sistem informasi keuangan daerah yang terkomputerisasi dan terkoneksi dengan jaringan internet dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan pada publik.

Sugijanto, et al (1995:6) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi *accountability* tersebut meliputi tiga unsur: (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*; (2) *having the internal parties review the information, and* (3) *taking corrective actions where*

necessary. Suatu entitas atau organisasi yang akuntabel adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar misalnya legislatif, auditor atau masyarakat secara luas dapat mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Sistem Informasi Keungan Daerah yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan jaringan internet, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan memperkecil peluang terjadinya manipulasi data keuangan publik, dan informasi keuangan yang tersaji dalam web/situs resmi pemerintah daerah akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendapat informasi tersebut. Begitu pula dengan keakuratan dan kecepatan merupakan hal penting dalam penyajian informasi keuangan, sehingga dengan SIKD yang terintegrasi dengan internet mampu mengatasi permasalahan akurasi dan aksesibiliti laporan keuangan pemerintah.

Berkaitan dengan pelaporan keuangan berbasis internet, faktor yang menjadi penentu utama adalah cara laporan keuangan disajikan kepada pengguna. Pengguna informasi keuangan pemerintah dengan internet akan terpicu menggunakannya ketika penyajiannya bersifat interaktif dan memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi yang berbeda dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis kertas atau *paper-based financial statement*.